

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani Periode 2015-2016

Fida Arumingtyas*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tagerang
Jl. Perintis Kemerdekaan No.33, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15118

Email : fidaarum@gmail.com

Abstract

The analysis conducted will interpret ratios or financial data and its implications. This research is compiled to analyze health assessment KJKS Berkah Madani years 2015-2016 using a standard assessment of the Regulation of the Minister of State for Cooperatives and SMEs RI Number: 35.3 / Per / M.KUKM / X / 2007 on guidelines for a health assessment KJKS and UJKS Cooperative. The results of this study will be taken into consideration in the evaluation and a policy for KJKS Berkah Madani to improve their business performance so that stability is maintained and is expected to enhance public trust in this Islamic Microfinance Institutions. The approach used in this study is a quantitative and descriptive variables used are capital; asset quality; management; efficiency; and liquidity. Based on analysis of the health assessment KJKS Berkah Madani can be seen that score recapitulation of five variables in 2015 amounted to 73,7832 and in 2016 increased to 79,9832 with the category Fairly Healthy.

Keywords: Health Assessment, Soundness, Cooperative Sharia, KJKS, BMT.

Abstrak

Analisis yang dilakukan ini akan menginterpretasikan rasio atau data keuangan dan implikasinya. Penelitian ini disusun untuk menganalisis penilaian kesehatan KJKS Berkah Madani tahun 2015-2016 dengan menggunakan penilaian standar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3 / Per / M.KUKM / X / 2007 tentang Pedoman Kesehatan penilaian KJKS dan

Koperasi UJKS. Hasil penelitian ini akan dipertimbangkan dalam evaluasi dan kebijakan KJKS Berkah Madani untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka sehingga stabilitas terjaga dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Islam ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan variabel modal; kualitas aset; manajemen; efisiensi; dan likuiditas. Berdasarkan analisis pengkajian kesehatan KJKS Berkah Madani akan terlihat bahwa rekapitulasi skor lima variabel pada tahun 2015 skor adalah sebesar 73,7832 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 79,9832, sehingga termasuk dalam kriteria “cukup sehat”.

Kata kunci: Penilaian Kesehatan, Kesehatan, Koperasi Syariah, KJKS, BMT.

Pendahuluan

Krisis ekonomi tahun 1997 telah mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Secara bertahap Indonesia mulai bahu membahu untuk menghidupkan kembali ruh ekonomi yang mulai tererosi oleh berbagai guncangan. Tahun demi tahun berganti akhirnya perekonomian telah mulai bergeliat. Namun belum separuh jalan geliat ekonomi itu ada, muncul kembali krisis ekonomi global yang mampu memporak-porandakan perekonomian internasional.

Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 telah membuat Indonesia bisa bertahan dalam menghadapi krisis global. Dampak yang terjadi tidak terlalu parah dan pertumbuhan ekonomi bisa terus ditingkatkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2017) [pertumbuhan ekonomi](#) Indonesia mencapai 5,02 persen di 2016. Angka ini lebih tinggi dari 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen. Demikian pula realisasi pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan 2014 yang sebesar 5,01 persen, meski masih lebih rendah dari 2013 yang di posisi 5,56 persen.

Berangkat dari tahun 1992, Indonesia telah mengukir tinta emas dalam bidang perkembangan perbankan syariah. Berawal dari berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan dibuktikan lagi dengan ketahanannya terhadap krisis ekonomi 1997 mampu membuat mata masyarakat terbuka. Kondisi tersebut menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa system bagi hasil dalam perbankan syariah hampir tidak terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda dunia perbankan. Ketika itu bank non syariah bertumbangan karena pertumbuhan negative (*negative spread*), karena bank non syariah dibebani perjanjian bunga pada nasabah di awal transaksi, sementara bank syariah tidak

memiliki perjanjian bunga¹. Tidak hanya itu, sektor-sektor usaha kecil juga terbukti lebih tahan krisis daripada perusahaan-perusahaan besar yang usahanya telah *bankable*.

Kenyataan bahwa Usaha Kecil Mikro (UKM) lebih mampu dalam memperkuat perekonomian nasional, semakin menyadarkan pemerintah untuk memberikan perhatian kepada UKM. Baitul Maal Wattamwil (BMT) mulai banyak didirikan untuk membantu UKM-UKM yang layak untuk mendapatkan bantuan. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendaagunaannya tersebut, maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah"²

Koperasi syariah telah mengalami perkembangan dengan baik di Indonesia. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun koperasi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi (Kemkop & UKM), jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang dengan volume usaha Rp5,2 triliun (infobank, 2016). Menurut Vesper (1987) yang dikutip oleh Sartika (2003: 138) menyatakan bahwa pengembangan para UKM melalui organisasi koperasi sangat dibutuhkan, karena berbagai penelitian membuktikan bahwa mereka tanpa organisasi koperasi tidak dapat mempergunakan jaringan kerjasama untuk menolong mereka dalam meningkatkan kemampuan dan motivasi kegiatan bisnisnya. Karena hal itulah maka koperasi terutama koperasi syariah harus selalu didorong serta didukung perkembangannya. Semakin meningkat perkembangan dan kontribusi KJKS atau yang dikenal dengan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) bagi masyarakat, maka tingkat kesehatannya juga perlu untuk diketahui. Selama ini teknik penghitungan tingkat kesehatan bank hanya digunakan untuk meneliti tingkat kesehatan Bank Umum konvensional maupun syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan

¹ Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.

² Buchori, Nur. Koperasi Syariah. Sidoarjo: Mashun. 2009.

Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan tingkat kesehatan koperasi-koperasi syariah jarang sekali dihitung tingkat kesehatannya.

Lembaga keuangan mikro (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagai sebuah lembaga yang berperan cukup besar dalam membangun ekonomi rakyat lapisan bawah dan mengurangi kemiskinan, perlu untuk tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Dalam menilai tingkat kesehatan, semua lembaga keuangan mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan adalah ukuran kinerja dan kualitas usaha dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan dan kelangsungan usaha, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian tingkat kesehatan KJKS sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual KJKS kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengukur tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan yaitu: (1) modal (*Capital*); (2) kualitas aktiva produktif (*Asset Quality*); (3) manajemen (*Management*); (4) rentabilitas (*Earning*); (5) likuiditas (*Liquidity*). Faktor-faktor yang tersebut diatas adalah faktor CAMEL yang dikenal sebagai kerangka dasar perhitungan tingkat kesehatan bank. Namun untuk menilai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, ada standar penilaian atau metode tersendiri. Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan KJKS adalah: (1) modal (*Capital*); (2) kualitas aktiva produktif (*Asset Quality*); (3) manajemen (*Management*); (4) efisiensi; (5) likuiditas (*Liquidity*). Perbedaan dari metode penghitungan tingkat kesehatan antara bank dengan KJKS hanya terletak pada penghitungan efisiensi. Efisiensi digunakan sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat dengan alasan bahwa tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota, bukan untuk mencari keuntungan.

Saat ini, banyak BMT yang berbadan hukum Koperasi Syariah tersebar di berbagai tempat. Diantara sekian banyak BMT tersebut tidak semuanya sukses, ada yang gagal maupun mampu bertahan hingga sekarang. Dalam salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waskita tentang analisis tingkat kesehatan BMT Bina Fitrah dinyatakan bahwa meskipun BMT Bina Fitrah cukup sehat, tetapi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki yaitu

dengan melakukan peningkatan rasio-rasio yang berada dibawah ketentuan PINBUK, antarlain rasio tingkat tunggakan, rasio cepat, dan rasio rentabilitas aset. Selain itu pihak manajemen juga harus bertindak cepat dalam mengambil keputusan di setiap permasalahan yang dialami BMT serta melakukan penerapan batas-batas dalam mengelola resiko yang akan dihadapi.³

Sedangkan menurut penelitian Yuniarsih tentang analisis tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ubasyada periode 2005-2006 menyatakan bahwa Ksu Ubasyada memperoleh predikat cukup sehat, namun ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan yaitu mengenai peningkatan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan pemahaman visi, misi, tujuan, dan rencana kerja koperasi kepada seluruh karyawan, meningkatkan sistem pengamanan terhadap semua dokumen penting, membentuk penyisihan penghapusan piutang yang mengacu pada perhitungan PPAPWD, serta meningkatkan penerapan batas-batas dalam pengelolaan resiko yang mungkin dihadapi.⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani yang pusatnya berada di kota Depok-Jawa Barat, juga telah ikut menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mulai menunjukkan kredibilitasnya. Jumlah aset yang mencapai lebih dari tiga milyar rupiah (Republika, 2016) mampu membuktikan bahwa KJKS Berkah Madani begitu terpercaya dalam mengelola keuangannya. Namun meskipun telah berdiri lama sejak 19 Oktober 2004 dan telah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, sampai saat ini tingkat kesehatan dari KJKS Berkah Madani belum pernah diteliti. Padahal dengan diketahuinya tingkat kesehatan KJKS ini dari aspek modal, aktiva produktif, manajemen, efisiensi, dan likuiditas, akan dapat dijadikan evaluasi bagi KJKS Berkah Madani agar lebih dapat menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja serta kelangsungan hidup sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Landasan Teori

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM./IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuan-

³ Waskita, Ilham. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Bina Fitrah Ditinjau dari Kinerja Keuangan. Jakarta: STEI SEBI. 2008.

⁴ Yuniarsih, Endah. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ubasyada Periode 2005-2006. Jakarta: STEI SEBI. 2007.

gan Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal (1), menyebutkan bahwa koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan usahanya di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan koperasi jasa keuangan syariah yang selanjutnya disebut KJKS, yaitu: koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Pada umumnya setiap KJKS terdiri dari Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS dalam kegiatan operasionalnya, yaitu:

unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan ini adalah bahwa praktik usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi, khususnya usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah.

Bentuk koperasi yang dimaksud di atas adalah simpan pinjam, istilah pinjaman dalam transaksi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan dan investasi. Pola hubungan yang dikembangkan adalah bukan kreditur-debitur, yaitu risiko ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dengan adanya penambahan bunga, melainkan pola kemitraan yang seimbang antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (pengelola) atau pola kerjasama (syirkah) yang kedua belah pihak memiliki kontribusi modal.⁵

Badan hukum KJKS sama dengan badan hukum yang dimiliki oleh BMT (Baitul Maal wa Tamwil), sebagaimana dalam Keputusan Menteri Negara dan Koperasi yang menyatakan bahwa BMT merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang kegiatan operasionalnya dan manajemennya tidak boleh terlepas dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk KJKS.

Menurut Buchori, kesehatan koperasi syariah adalah suatu kondisi yang dinyatakan dalam bentuk penilaian dengan predikat sehat cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Acuan penyusunan kesehatan KJKS adalah (1) SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997; (2) acuan manajemen yang tidak bertentangan secara

⁵ Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

prinsip; (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 227/KEP/M/V/1996; (4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.⁶

Dari penilaian kesehatan KJKS akan diketahui kinerja KJKS tersebut. Kinerja KJKS merupakan ukuran keberhasilan bagi manajemen atau pengelola KJKS tersebut, sehingga apabila kinerja KJKS buruk maka pengelola KJKS akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dan cara memperbaikinya. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu KJKS, dapat diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode untuk mengukur tingkat kesehatan KJKS adalah dengan mengukur dari aspek modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, dan likuiditas. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan aspek yang dinilai juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian kelima aspek tersebut. Penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KJKS

Skor	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

2. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian yang menuturkan serta menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya sesuai dengan yang terjadi dalam penelitian (Subana dan Sudrajat, 2005:89). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tan-

⁶ Buchori, N. S. Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Banten: Penerbit Pustaka Aufa Media (PAM Pres). 2012.

pa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani dilihat dari aspek modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, dan likuiditas pada periode 2015-2016.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan masalah yang akan diteliti secara lengkap, maka teknik yang akan dipergunakan adalah:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998:236). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahun 2015 dan 2016 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani Depok yang digunakan untuk mengetahui aspek modal, kualitas aktiva produktif, efisiensi, dan likuiditas.

2. Metode Interview

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang akan diteliti. Wawancara atau tanya jawab dilakukan dengan manajer Koperasi Jasa Keuangan Berkah Madani untuk mengetahui aspek manajemen.

3.4 Hipotesis

H0 : KJKS Berkah Madani masuk kriteria sehat.

H1 : KJKS Berkah Madani masuk kriteria tidak sehat.

3.5 Pengolahan Data

Pada tahap ini data diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap pertama, melakukan penyesuaian bobot dari variabel yang akan dihitung, karena menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian tingkat kesehatan KJKS dan UJKS penghitungan tingkat kesehatan dihitung dengan menggunakan 8 (delapan) aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri

koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, serta kepatuhan prinsip syariah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisisensi, dan likuiditas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian bobot.

Tahap kedua, tiap-tiap faktor dihitung berdasarkan aspek atau komponen yang membaginya sehingga didapatkan hasil yang berupa persentase.

Tahap ketiga, setelah didapatkan hasilnya, maka hasil tersebut dikelompokkan untuk mencari besaran penilaian.

Tahap keempat, tiap-tiap penilaian dikalikan dengan besaran bobot yang telah disesuaikan di awal.

Tahap kelima, setelah didapatkan skor pada masing-masing aspek, seluruh skor yang didapatkan kemudian dijumlahkan untuk mengetahui golongan dari KJKS tersebut (sehat atau tidak sehat). Secara lebih rinci pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Bobot Penilaian Kesehatan KJKS terhadap 8 (delapan) Aspek Kesehatan KJKS

	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5		Kuantitatif

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)...

2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	10	20	Kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah portofolio berisiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	3	15	Kualitatif
		b. Kelembagaan	3		Kualitatif
		c. Manajemen permodalan	3		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	3		Kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	3		Kuantitatif dan kualitatif

4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto Biaya operasional pelayanan Partisipasi bruto $\times 100\%$	4	10	Kuantitatif
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
		c. Rasio efisiensi staf Jumlah mitra pembiayaan Jumlah staf $\times 100\%$	2		Kuantitatif
5.	Likuiditas	a. Cash ratio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	15	Kuantitatif
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5		Kuantitatif

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)...

6.	Ke- mandi- rian dan pertum- buhan	a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat, dan pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{Pendapatan usaha}}{\text{Biaya operasional pelayanan}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
7.	Jatidiri Koper- asi	a. Rasio Partisipasi bruto $\frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto + transaksi non anggota}} \times 100\%$	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota	5		Kuantitatif
8.	Kepatu- han prinsip syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10	Kualitatif
Total			100		

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

Namun dalam penelitian ini, penilaian kesehatan KJSK Berkah Madani akan dinilai dari 5 (aspek) yaitu dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, dan likuiditas. komponen-komponen yang dipakai, menggunakan komponen-komponen utama/pokok saja, dan tidak menggunakan komponen-komponen pendukung seperti rasio portofolio pembiayaan berisiko dalam penghitungan aspek kualitas produktif serta rasio efisiensi staf dalam penghitungan aspek efisiensi KJSK. Penggunaan 5 (lima) aspek dalam penilaian kesehatan KJSK Berkah Madani mempengaruhi penetapan jumlah bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian bobot-bobot yang akan digunakan untuk menghitung tingkat kesehatan KJSK Berkah Madani.

Tabel 3
Rekapitulasi Penyesuaian Bobot Penilaian Kesehatan KJSK terhadap 5 (lima) Aspek Kesehatan KJSK

No.	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	7,15	14,3	Kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	7,15		

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)...

2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	19,1	28,6	Kuantitatif
		b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$			Kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	4,28	21,4	Kualitatif
		b. Kelembagaan	4,28		Kualitatif
		c. Manajemen permodalan	4,28		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	4,28		Kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	4,28		Kuantitatif dan kualitatif
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	7,15	14,3	Kuantitatif
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	7,15		Kuantitatif

5.	Likuiditas	a. Cash ratio			
		$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	14,3	21,4	Kuantitatif
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima			
$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	7,1		Kuantitatif		
Total			100	100	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang telah disesuaikan bobot penilaiannya.

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Penilaian Kesehatan KJKS, menjelaskan bahwa penilaian kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pihak yang akan menilai kesehatan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, diharapkan dengan adanya penilaian ini dapat membantu dalam meningkatkan kredibilitas dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Perhitungan penilaian kesehatan KJKS Berkah Madani berdasarkan laporan keuangan tahun 2015-2016 dan hasil interview adalah sebagai berikut :

4.1 Perhitungan Aspek Permodalan

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Modal

Komponen atau rasio pertama untuk menghitung aspek permodalan adalah dengan menggunakan rasio modal sendiri terhadap total modal. Maksud dari penilaian aspek ini adalah untuk mengukur kemampuan KJKS dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Modal sendiri KJKS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki cirri-ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% (lima puluh perseratus) modal penyertaan.

Tahun 2015 modal sendiri yang merupakan jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan SHU yaitu Rp

817.998.296,00 dan pada tahun 2016 jumlah modal sendiri mengalami kenaikan 5,99% yaitu berjumlah Rp867.041.078,00. Kenaikan jumlah modal sendiri disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan SHU. Dengan semakin bertambahnya jumlah modal sendiri dari KJKS, maka jumlah anggotanya juga semakin bertambah.

Total modal adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, SHU, simpanan sukarela, dan simpanan khusus. Total modal KJKS Berkah Madani tahun 2015 adalah sebesar Rp 922.197.010,00 dan pada tahun 2016 menjadi Rp 978.463.235,00. ini berarti bahwa total modal tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,10%. Kenaikan tersebut disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah total modal yang disebabkan semakin bertambahnya jumlah anggota KJKS Berkah Madani.

Rasio modal merupakan perhitungan antara modal sendiri dengan total modal dikalikan 100%. Pada tahun 2015 jumlah rasio modal sebesar 88,70% dan pada tahun 2016 menjadi 88,61%, ini berarti bahwa rasio modal KJKS Berkah Madani terjadi penurunan sebesar 0,9%.

Rasio permodalan KJKS Berkah Madani tahun 2015 dan 2016 berjumlah lebih dari 20%, maka nilai kreditnya adalah sebesar 100. Skor diperoleh dari perkalian antara nilai kredit dengan bobot skor (bobot skor adalah 7,15%), hasilnya diperoleh skor 7,15 (tahun 2015 dan 2016). Jadi, dengan diperolehnya skor 7,15 pada tahun 2015 dan 2016 dapat disimpulkan bahwa KJKS Berkah Madani adalah "**sehat**". Artinya bahwa KJKS Berkah Madani telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya.

1. Rasio Kecukupan Modal

Rasio kedua untuk menghitung kesehatan aspek permodalan adalah rasio kecukupan modal (CAR). Penggunaan rasio ini bertujuan agar para pengelola KJKS melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada.

Tahapan pertama dalam menghitung rasio CAR adalah dengan menghitung jumlah nilai modal inti dan modal pelengkap. Tahun 2015 rasio CAR yang dihasilkan adalah sebesar 28,61%. Tahun ini tidak terjadi perubahan karena merupakan awal perhitungan permodalan. Ini berarti bahwa setiap Rp 100,00 modal yang ada akan menutup kemungkinan tertutupnya kerugian atas kredit sebesar Rp 28,61. Tahun 2016 rasio CAR yang dihasilkan sebesar 23,58%.

Pada tahun ini rasio CAR mengalami penurunan sebesar 5,03% yang disebabkan oleh kenaikan modal inti dan pelengkap sebesar 4,5% dan kenaikan ATMR sebesar 26,8%. Ini berarti bahwa setiap Rp 100,00 modal yang ada akan menutup kemungkinan kerugian atas kredit sebesar Rp23,58.

Rasio CAR tahun 2015 adalah sebesar 28,61% dan tahun 2016 adalah sebesar 23,58%. Rasio CAR pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dan persentasenya lebih besar dari 8%. Ini berarti bahwa jumlah bobot kreditnya adalah 100 dan bobot risiko skornya adalah 7,15% sehingga skornya adalah 7,15. berarti dengan jumlah skor sebesar 7,15 KJKS Berkah Madani termasuk dalam kriteria KJKS “**sehat**”.

2.1 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Penilaian aspek kualitas aktiva produktif dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) rasio utama yaitu rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Rasio PPAP menunjukkan perbandingan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk oleh koperasi terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD) oleh KJKS Berkah Madani pada periode 2015-2016.

Pada tahun 2015 rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan KJKS Berkah Madani sebesar 12,72%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah piutang dan pembiayaan yang bermasalah (jumlah dari tunggakan pokok dan tunggakan marjin) sebesar Rp304,123,029,00 dan jumlah piutang dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp2,390,610,581,00. Dari rasio tersebut diperoleh nilai kredit sebesar 25 karena rasio pembiayaan bermasalah tersebut lebih dari 12%. Dengan bobot skor 19,1% maka jumlah skornya adalah 4,775. Rasio ini menunjukkan bahwa pembayaran pembiayaan KJKS Berkah Madani tahun 2015 termasuk dalam kriteria “**tidak lancar**”.

Tahun 2016 rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan KJKS Berkah Madani sebesar 7,54%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah piutang dan pembiayaan yang bermasalah (jumlah dari tunggakan pokok dan tunggakan marjin) sebesar Rp 223,585,736,00 dan jumlah piutang

dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 2,967,058,255,00. Rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,18%. Ini berarti bahwa jumlah pembiayaan bermasalah di KJKS Berkah Madani tahun 2016 mengalami penurunan daripada tahun 2015. Rasio sebesar 7,54% tersebut berada dalam kategori antara 5% - 8% dan diperoleh nilai kredit sebesar 75 dengan jumlah bobot risiko sebesar 19,1%, maka jumlah skornya adalah sebesar 14,325. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pembiayaan dan piutang di KJKS Berkah Madani tahun 2016 termasuk dalam kategori "**cukup lancar**".

Rasio kedua untuk menghitung aspek kualitas aktiva produktif adalah dengan menggunakan rasio penyisihan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KJKS menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Perhitungan tingkat kesehatan rasio ini adalah sebagai berikut: (1) mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet; (2) menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan; (3) menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif; (4) rasio PPAP dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100% (seratus perseratus); (5) untuk rasio PPAP sebesar 0% (nol perseratus) nilai kredit samadengan 0 (nol). Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% (satu perseratus) nilai kredit ditambah 1 (satu) sampai dengan maksimum 100 (seratus); (6) nilai kredit dikalikan dengan bobot 9,5% (sembilan koma lima perseratus), diperoleh skor tingkat rasio PPAP. Pada tahun 2015 jumlah PPAP KJKS Berkah Madani sebesar Rp125,124,989,00 dan jumlah PPAPWD adalah sebesar Rp246,831,177,78 sehingga dari perbandingan kedua komponen tersebut dihasilkan rasio PPAP sebesar 50,7%. Dari nominal rasio tersebut maka dihasilkan nilai kredit sebesar 50 dengan bobot sebesar 9,5% maka akan dihasilkan skor sebesar 4,75. Dengan jumlah skor 4,75 maka PPAPWD dari KJKS Berkah Madani pada tahun 2015 tergolong "**kurang lancar**".

Tahun 2016 jumlah PPAP mengalami penurunan sebesar 2,15% dan PPAPWD juga mengalami penurunan sebesar 48,9%. Dari perbandingan jumlah PPAP dengan PPAPWD maka dihasilkan rasio sebesar 97,1%. Dengan rasio tersebut maka diperoleh nilai kredit

sebesar 90 dengan dikalikan bobot 9,5% maka akan dihasilkan skor sebesar 8,55. Dari skor tersebut maka KJKS Berkah Madani pada periode 2016 tergolong **“lancar”**.

2.2 Penilaian Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen KJKS meliputi 5 (lima) komponen, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Berdasarkan wawancara dengan manajer KJKS Berkah Madani, didapat hasil penilaian aspek manajemen KJKS Berkah Madani tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 manajemen umum KJKS Berkah Madani mempunyai nilai kredit bobot sebesar 4,28 dan masuk dalam kriteria **“baik”**. Dari sisi kelembagaan memiliki bobot 2, 8532 dan termasuk dalam kriteria **“cukup baik”**. Manajemen permodalan mendapat nilai kredit bobot sebesar 2,568 dengan kriteria **“cukup baik”**. Manajemen aktiva didapatkan hasil nilai kredit bobot sebesar 3,852 dan termasuk dalam kriteria **“baik”**. Manajemen likuiditas mendapatkan nilai kredit bobot sebesar 4,28 dengan kriteria **“baik”**.

Tahun 2016 manajemen umum KJKS Berkah Madani mempunyai nilai kredit bobot sebesar 4,28 dan masuk dalam kriteria **“baik”**. Dari sisi kelembagaan memiliki bobot 2, 8532 dan termasuk dalam kriteria **“cukup baik”**. Manajemen permodalan mendapat nilai kredit bobot sebesar 2,568 dengan kriteria **“cukup baik”**. Manajemen aktiva didapatkan hasil nilai kredit bobot sebesar 3,852 dan termasuk dalam kriteria **“baik”**. Manajemen likuiditas mendapatkan nilai kredit bobot sebesar 4,28 dengan kriteria **“baik”**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek manajemen KJKS Berkah Madani tahun 2015 dan 2016 tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Adapun rincian hasil perhitungan nilai pertanyaan/pernyataan manajemen pada KJKS Berkah Madani tidak dapat dipublikasikan karena merupakan sebuah rahasia. Penilaian KJKS ini diharuskan memiliki sistem pengelolaan yang baik, antara lain dibuktikan dengan adanya kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta penerapan batas-batas dalam pengelolaan resiko.

2.3 Penilaian Aspek Efisiensi

Tahun 2015 biaya operasional pelayanan KJKS Berkah Madani sebesar Rp547,613,768,00 dan jumlah partisipasi bruto sebesar Rp607,674,253,00 sehingga rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah sebesar 90,1%. Dengan rasio sebesar 90,1% maka diperoleh nilai kredit 50 dan skornya adalah 3,575. Ini berar-

ti bahwa operasional pelayanan KJKS Berkah Madani pada tahun 2015 adalah **"kurang efisien"**.

Pada tahun 2016 rasio operasional pelayanan KJKS Berkah Madani mengalami kenaikan sebesar 0,55% yaitu 90,65%, karena biaya operasional pelayanan juga naik sebesar 15,5% yaitu Rp632,822,406,00 dan partisipasi bruto juga mengalami kenaikan sebesar 14,9% yaitu Rp698,079,019,00. Rasio sebesar 90,65% berada pada rasio 85% - 100%. Ini berarti bahwa operasional pelayanan KJKS Berkah Madani kepada anggotanya pada tahun 2016 **"kurang efisien"**. Naiknya jumlah biaya operasional pelayanan dan partisipasi bruto pada tahun 2016 juga menimbulkan naiknya tingkat rasio operasional pelayanan KJKS Berkah Madani. Namun kenaikan yang terjadi kurang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan KJKS Berkah Madani untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan **"kurang efisien"**.

Rasio kedua dalam perhitungan aspek efisiensi KJKS adalah rasio aktiva tetap terhadap total aset. Tahun 2015 jumlah aktiva tetap KJKS Berkah Madani adalah sebesar Rp70,726,385,00 sedangkan jumlah total aset adalah sebesar Rp3,105,387,505,00. Dari perbandingan 2 (dua) komponen tersebut, diperoleh rasio sebesar 2,28%. Dengan jumlah rasio 2,28% maka diperoleh skor sebesar 7,15. Semakin kecil rasio, maka semakin bagus/baik rasio tersebut. Ini berarti bahwa total aktiva tetap dibanding total aset KJKS Berkah Madani tahun 2015 tergolong **"baik"**.

Tahun 2016 jumlah aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 22,15% yaitu Rp55,057,136,00. Sedangkan total aset mengalami kenaikan sebesar 28,01% yaitu Rp3,975,182,696,00. Jumlah rasio aktiva tetap terhadap total aset pada tahun ini adalah sebesar 1,4% (mengalami penurunan sebesar 0,88%). Skor yang diperoleh adalah 7,15 sehingga perbandingan antara total aktiva tetap dengan total aset KJKS Berkah Madani pada tahun 2016 tergolong **"baik"**.

2.4 Penilaian Aspek Likuiditas

Likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah kemampuan KJKS untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan.

Tahun 2015 total kas dan bank sebesar Rp459,323,440,0 sedangkan total kewajiban lancar yang terdiri dari komponen simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan mudharabah berjangka adalah sebesar Rp1,589,742,294,00. Dari perbandingan an-

tara jumlah kas dan bank dengan total kewajiban lancar, maka diperoleh rasio kas sebesar 28,9%. Karena rasio 28,9% berada antara rasio 26% - 34% maka mendapat nilai kredit sebesar 100 dan jumlah skornya adalah 14,3. Dengan jumlah skor sebanyak 14,3 maka posisi kas KJKS Berkah Madani pada tahun 2015 tergolong **"likuid"**. Ini berarti bahwa KJKS Berkah Madani pada tahun 2015 mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas).

Tahun 2016 total kas dan bank naik sebesar 72,1% yaitu Rp 790,634,368,00. Sedangkan total kewajiban lancar yang dihitung dari total simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan mudharabah berjangka mengalami kenaikan sebesar 4,59% yaitu Rp 1,662,695,200,00. Rasio kas juga mengalami kenaikan sebesar 18,6% yang jumlah persentasenya adalah sebesar 47,5%. Dengan jumlah persentase rasio 47,5%, rasio tersebut berada pada golongan rasio (14% - 20%) dan (46% - 56%), sehingga mendapatkan nilai kredit sebesar 50 dan skor 7,15. Posisi tersebut membuat rasio kas dari KJKS Berkah Madani pada tahun 2016 tergolong **"kurang likuid"**.

Rasio kedua dalam penilaian aspek likuiditas adalah dengan menghitung rasio pembiayaan. Rasio pembiayaan dihitung dengan membandingkan pembiayaan dengan jumlah dana yang diterima. Tahun 2015 jumlah pembiayaan sebesar Rp 2,379,926,481,00 sedangkan dana yang diterima sebesar Rp 1,609,127,424,00. Dari perbandingan kedua komponen tersebut diperoleh rasio pembiayaan sebesar 147,9%. Karena jumlah rasionya yang lebih dari 100 maka mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan bobot risiko sebesar 7,1% sehingga jumlah skornya adalah 7,1. Skor tersebut menunjukkan bahwa rasio pembiayaan tergolong **"likuid"**. Ini berarti bahwa KJKS Berkah Madani mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya di tahun 2015.

Tahun 2016 jumlah pembiayaan naik sebesar 24,1% yaitu terbilang Rp2,953,245,420,00 sedangkan jumlah dana yang diterima juga mengalami kenaikan sebesar 4,95% terbilang Rp1,688,835,740,00. Dengan naiknya 2 (dua) komponen tersebut maka rasio pembiayaan di tahun 2009 juga mengalami kenaikan sebesar 27% dengan persentase rasio sebesar 174,9%. Semakin tinggi rasio pembiayaan, maka semakin likuid rasio tersebut. Dengan jumlah rasio sebesar 174,9% maka rasio tersebut mendapat nilai kredit sebesar 100 dan bobot risiko 7,1%, sehingga skornya adalah 7,1. Ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan KJKS Berkah Madani tahun 2016 adalah **"likuid"**. Jadi, KJKS Berkah Madani di tahun 2016 mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

4.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Variabel Penilaian Kesehatan KJKS Berkah Madani

Dari hasil perhitungan variabel diatas telah didapatkan nilai rasio, nilai skor, dan kriteria dari masing-masing komponen penilaian kesehatan. Kemudian hasil perhitungan tersebut direkapitulasi sesuai dengan tabel bobot penilaian variabel dan komponen kesehatan Penilaian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUK-M/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi. Berikut merupakan tabel rekapitulasi hasil perhitungan variabel penilaian kesehatan KJKS Berkah Madani tahun 2015-2016:

Tabel 4
Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS Berkah Madani Periode 2015-2016

No	Faktor yang Dinilai	2015				2016			
		Rasio	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Rasio	Nilai Kredit	Bobot	Skor
1	Permodalan								
	a. Rasio modal	88.70%	100	7.15%	7.15	88.61%	100	7.15%	7.15
	b. Rasio CAR	28.61%	100	7.15%	7.15	23.58%	100	7.15%	7.15
2	Kualitas Aktiva Produktif								
	a. Rasio pembiayaan bermasalah	12.72%	25	19.10%	4.775	7.54%	75	19.10%	14.325
	b. Rasio PPAP	50.70%	50	9.50%	4.75	97.10%	90	9.50%	8.55
3	Manajemen								
	a. Manajemen umum	-	-	4.28%	4.28	-	-	4.28%	4.28
	b. Kelembagaan	-	-	4.28%	2.8532	-	-	4.28%	2.8532
	c. Manajemen permodalan	-	-	4.28%	2.568	-	-	4.28%	2.568
	d. Manajemen aktiva	-	-	4.28%	3.852	-	-	4.28%	3.852
	e. Manajemen likuiditas	-	-	4.28%	4.28	-	-	4.28%	4.28
4	Efisiensi								

	a. Rasio biaya operasional	90.10%	50	7.15%	3.575	90.65%	50	7.15%	3.575
	b. Rasio aktiva tetap terhadap aset	2.28%	100	7.15%	7.15	1.40%	100	7.15%	7.15
5	Likuiditas								
	a. Rasio kas	28.90%	100	14.30%	14.3	47.50%	50	7.10%	7.15
	b. Rasio pembiayaan	147.90%	100	7.10%	7.1	174.90%	100	7.10%	7.1
	Nilai Akhir				73.7832				79.9832
	Kriteria				Cukup Sehat				Cukup Sehat

Sumber: diolah dari data keuangan dan manajemen KJKS Berkah Madani tahun 2015-2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah skor tahun 2015 adalah sebesar 73,7832 dan pada tahun 2016 adalah sebesar 79,9832, sehingga skor tingkat kesehatan KJKS Berkah Madani mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa KJKS Berkah Madani pada periode 2015-2016 termasuk dalam kategori KJKS “**cukup sehat**” apabila dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, dan likuiditas.

Simpulan

Menurut hasil analisis penilaian kesehatan KJKS Berkah Madani tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi, menunjukkan bahwa jumlah skor tahun 2015 adalah sebesar 73,7832 dan pada tahun 2016 adalah sebesar 79,9832, sehingga termasuk dalam kriteria “**cukup sehat**”.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Buchori, Nur. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun. 2009.
- Buchori, N. S. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Penerbit Pustaka Afa Media (PAM Pres). 2012.

- Buang, Ahmad Hidayat. *Koperasi Secara Islam dalam Kerangka Perundangan Malaysia*. Jurnal Syariah 12:2. 2004.
- Fajrie, Alwin. *Mekanisme Pendirian BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Makalah Seminar dan Workshop Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. P3EI.
- Hendrojogi. *Koperasi, Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.
- Rizky, Awalil. *Fakta dan Prospek BMT*. Yogyakarta: UCY Press. 2007
- Yuniarsih, Endah. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ubasyada Periode 2005-2006*. Jakarta: STEI SEBI. 2007.
- Waskita, Ilham. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Bina Fitrah Ditinjau dari Kinerja Keuangan*. Jakarta: STEI SEBI. 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Laporan Keuangan KJKS Berkah Madani Periode 2015-2016.
- Standar Operasional Prosedur KJKS Berkah Madani 2016.
- Laporan Kinerja 2016 dan Rencana Kerja 2017.
- Umainah, Siti. (2017, Agustus). Personal Interview.